

## penanggulangan illegal logging dalam rangka menjaga kelestarian hutan pada wilayah hukum Polres Tanah Laut

Yustam Dwi Heno

Deskripsi Lengkap: <http://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=35507&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana latar belakang terjadinya praktek illegal logging di wilayah hukum Polres Tanah Laut. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana langkah penanggulangan terhadap praktek illegal logging serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala bagi Polres Tanah Laut dalam penanggulangan praktek illegal logging. Salah satu manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Polres Tanah Laut agar dapat membuktikan keterlibatan tersangka sebagai pelaku praktek Illegal Logging di wilayah hukum Polres Tanah Laut. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (field research).

Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi maraknya praktek illegal logging di wilayah hukum Polres Tanah Laut antara lain tidak pahamnya para pelaku akan dampak yang diakibatkan dari praktek illegal logging bagi pelestarian hutan. Selain itu juga hal yang melatarbelakangi adalah kemudahan dan kebiasaan masyarakat setempat yang malas dan sudah terbiasa dengan mudahnya mendapat keuntungan dari praktek illegal logging tersebut, ditambah dengan sulitnya lapangan pekerjaan dan terbatasnya lahan bagi mereka untuk berladang. Upaya penanggulangan kejahatan illegal logging yang dilakukan oleh Polres Tanah Laut adalah terdiri dari penggabungan fungsi pre emtif, preventif dan represif melalui koordinasi antar Satuan Fungsi yang ada di dalam Polres Tanah Laut. Wujud nyata penanggulangan kejahatan ilegal logging oleh Polres Tanah Laut dilakukan dalam program Opsus Hutan Lestari Intan tahun 2007 dan 2008 sedangkan pada tahun 2009 tidak ada operasi khusus.

Beberapa faktor yang menjadi kendala penanggulangan illegal logging adalah sarana angkutan yang belum memadai karena hutan yang ada di wilayah hukum Polres Tanah Laut terletak di pegunungan sehingga untuk melewati jalan pegunungan. Koordinasi antar satuan fungsi di dalam Polres Tanah Laut belum berjalan dengan maksimal, selain itu kebijakan yang terkait dengan lalu lintas yang ada menjadikan kegiatan pengangkutan kayu ilegal menjadi mudah. Selain itu juga keberadaan Perda yang menyangkut izin pengelolaan limbah kayu ulin tidak disebutkan kayu sepanjang 1,5 meter maka dimanfaatkan sebagai modus operandi pelaku. Dengan demikian perlu langkah lebih jauh untuk meninjau kembali keberadaan Perda tersebut. Disarankan juga untuk melakukan upaya terpadu dalam rangka penanggulangan praktek illegal logging dan pemeliharaan kelestarian hutan yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem, misalnya seperti bekerjasama dengan LSM setempat yang peduli dengan lingkungan seperti melakukan kampanye lingkungan hidup, propaganda anti penebangan liar serta bekerjasama dengan media audio dan visual setempat seperti stasiun televisi dan radio untuk mengadakan talk show tentang program-program pelestarian hutan.